

Nama : **Linda Agustina**
NPM : **2213053120**
Kelas : **2B**
Matkul : **Pendidikan Kewarganegaran**
SKS : **2 SKS**
Dosen Pengampu : **Siti Nuraini, M. Pd**
Hari/Tgl : **Senin, 17 April 2023**

Analisis Jurnal

Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019 *Democracy And The 2019 Election*

Demokrasi mudah ditafsirkan " pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat" dan untuk rakyat". Namun, untuk mewujudkannya makna ini tidak mudah karena demokrasi membutuhkan proses dan tahapan yang panjang penting untuk dilalui, sebagai sebuah proses konsolidasi demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan presiden pada dasarnya sama merupakan kelanjutan dari penggabungan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup jaminan prinsip kebebasan individu dan Kesetaraan, terutama pada hak politik.

Didalam konteks ini, pemilihan presiden secara langsung dapat dilakukan proses demokrasi formal ini adalah perpanjangan garansi hak-hak politik ini. Oleh karena itu dalam Dalam penelitian ini, pemilihan presiden tidak hanya dianggap terbatas hanya Partai Demokrat, tetapi meskipun demikian Instrumen proses pendalaman demokrasi level nasional. Sebagai alat pendalaman Demokrasi, pemilihan presiden adalah upaya kreatif pemerintahan yang efektif setelah pemilu.

Participan community (politis partisipasi), menjelaskan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut secara politis:

- Aktif atau sampai ke tingkat keputusan Proses manufaktur? Termasuk ketaatan

- Legitimasi (apakah itu elit dan masyarakat memenuhi ketentuan peraturan yang dibuat mengacu pada proses politik dan administrasi?);
- Budaya kekerasan (yang mempraktekkan Kekerasan masih atau terus merajalela memasuki proses politik dan pemerintahan?);
- Keterbukaan politik (semua tersedia Informasi untuk komunitas aktif proses politik dan administrasi?);
- Toleransi (Dapatkah masyarakat menerima perbedaan Pendapat dan siap untuk consensus kemungkinan perbedaan);
- Persamaan (apa memiliki kedudukan, kedudukan, hak dan kedudukan yang sama Kewajiban masyarakat politis atau tepat masih banyak budaya feodal/patrimonial);
- Menghormati hak asasi manusia (apakah ada hal seperti itu budaya yang menghormati hak-hak dasar Manusia?)

Dinamika politik menjelang pemilu 2019 semakin memanas, apalagi seputar ini tuduhan penipuan. Hingga 20 April 2019 ,Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk Calon Presiden/ Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudi sebagai calon wakil presiden Ini secara resmi diumumkan oleh PBB, misalnya sekitar 1.200 daftar kecurangan pemilih sementara 2019 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal yang sama terjadi dengan tim kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau penipuan yang menguntungkan pasangan yang bersaing Prabowo-Sandiaga

Persaingan ini sulit untuk disangkal dan Kampanye menentang pemilihan presiden tingkat kegembiraan yang mengikuti warna di media massa dan media sosial (media sosial). Emosi orang sering terlibat dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena banyak dari mereka akhirnya tidak perlu melakukannya berurusan dengan hukum. Maksudnya, Misalnya, kata Wiranto asalkan Pada tahun 2018 terdapat 53 berita bohong (fake news) dan 324 ujaran kebencian terjadi dan beberapa di antaranya diselesaikan secara hukum.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin meningkat besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil. Ini bukan keadaan ini hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi tetapi juga stabilitas nasional. Ketika pemilihan diadakan di tengah-tengah partisi media sosial, hal yang terjadi yaitu menyebarkan berita sensasional di media

sosial, ujaran kebencian dan tersebar luas berita palsu membuat hasil pemilu rentan dengan argumentasi dan konflik.

Proses pendalaman/pemantapan demokrasi memainkan peran penting aktor dan elemen terkait pemilu orang kuat lainnya seperti masyarakat sipil, Elit/aktor, media dan media sosial institusi penelitian kemandirian, kedewasaan, dll. Partisipasi kekuatan sosial (sosial kekuatan) sangat diperlukan. Masyarakat sipil misalnya, pendamping harus tetap kritis pemilu dan hasilnya. Media massa bisa reporter berita yang objektif dan berdedikasi kontrol sosial untuk kebaikan rakyat. Tentang semua ini aktor pemilu seperti partai Politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan Aparat penegak hukum harus bekerja sinergis profesional untuk mengembalikan kepercayaan diri publik tentang hasil pemilu. Hal diperlukan untuk keberhasilan atau kegagalan pemilihan, konflik presiden sangat tergantung tingkat kepercayaan yang dimiliki orang kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena itu dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin signifikan. Demokrasi yang dibangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan akan muncul Keyakinan dan opsi damai. Sebaliknya, demokrasi yang lebih prosedural dibangun bahkan lebih besar melalui pemilu kepercayaan publik dan semakin rentan perselisihan/konflik akan terjadi.